

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah selalu ingin mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk menunjang agar tercapainya tujuan-tujuan tersebut maka harus ada peran pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik, yang berfungsi untuk memastikan bahwa dana yang digunakan oleh pemerintah daerah dikelola secara transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban keuangan tidak hanya mencakup pelaporan yang tepat waktu dan akurat, tetapi juga mencerminkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran (Mardiasmo, 2021).

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan public (Abimanyu et al., 2024). Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa dana publik dikelola dengan baik, mereka akan lebih mendukung program-program pembangunan dan partisipasi dalam proses pemerintahan. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan yang efektif juga berperan dalam mencegah penyimpangan dan korupsi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Tantangan yang dihadapi dalam mencapai pertanggungjawaban keuangan yang optimal di Provinsi Sulawesi Barat mencakup berbagai faktor, seperti



1. fiskal yang diterapkan, kapasitas sumber daya manusia, sistem yang ada, dan pemanfaatan teknologi informasi. Memahami dan

menganalisis faktor-faktor ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dan pada gilirannya, mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.

Kinerja keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain yang saling berhubungan dan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran daerah (Hendrayady et al., 2022). Salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM), di mana kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintahan yang mengelola keuangan sangat menentukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Selain itu, sistem pengawasan yang kuat, baik dari pengawasan internal maupun eksternal, sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan mencegah penyalahgunaan.

Teknologi informasi juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaporan keuangan, dengan sistem yang tepat memungkinkan pengawasan dan pengelolaan anggaran yang lebih cepat dan akurat. Semua faktor ini saling berintegrasi untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Masengi et al., 2023).

Sulawesi Barat, meskipun memiliki potensi sumber daya yang besar, namun menghadapi tantangan signifikan dalam hal pengelolaan keuangan. Salah satu isu utama adalah tingkat transparansi yang masih rendah dalam pelaporan keuangan yang dapat menimbulkan keraguan dari publik mengenai penggunaan anggaran.

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat dioptimalkan melalui pengelolaan

yang transparan dan akuntabel masih terkendala oleh berbagai faktor.



Salah satu faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban keuangan adalah kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas dalam pengelolaan keuangan daerah. Banyak pegawai pemerintah yang perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, sistem pengawasan yang belum sepenuhnya efektif dapat membuka peluang untuk penyimpangan dan korupsi, yang tentunya berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Welang (2024) menunjukkan permasalahan/ latar belakang (GAP) yakni adanya catatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa yang disebabkan oleh faktor Kualitas Sumber Daya Manusia dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat juga berpengaruh terhadap praktik pertanggungjawaban keuangan daerah. Kebijakan yang tidak konsisten atau kurang jelas dapat mengganggu proses pertanggungjawaban keuangan dan menyulitkan pejabat dalam menjalankan tugas mereka sebagai upaya daerah dalam meningkatkan akuntabilitas.

Sistem informasi keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah juga mempengaruhi efektivitas pertanggungjawaban keuangan (Fahd & Rasyid, 2017). Penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat membantu dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data keuangan secara lebih efisien. Sebaliknya, sistem yang ketinggalan zaman dapat memperlambat proses dan meningkatkan risiko kesalahan. Gap yang sering terjadi yakni meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban keuangan, masih tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian



yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban keuangan di Sulawesi Barat.

Terkait dengan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2020 hingga 2024, Provinsi Sulawesi Barat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya, yang menunjukkan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan bebas dari kesalahan material. Namun, meskipun mendapatkan opini WTP, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola laporan keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal agar pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan.

Meskipun Provinsi Sulawesi Barat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2020 hingga 2024, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pelaporan keuangan yang ideal di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Berdasarkan hasil wawancara dengan penyusun laporan keuangan, masih terdapat berbagai kendala teknis dan nonteknis dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Salah satu permasalahan utama adalah pergantian aplikasi pelaporan keuangan setiap tahun yang menyebabkan data tahun sebelumnya harus di-input ulang ke sistem baru. Hal ini meningkatkan potensi kesalahan input, terutama bagi SDM yang belum memahami penggunaan aplikasi secara optimal. Selain itu, koordinasi antara OPD dan bagian keuangan dalam pengelolaan data aset juga



belum sinkron, sehingga kerap ditemukan perbedaan pencatatan antara aplikasi dengan kondisi riil di lapangan.

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan Inspektorat sering kali tidak sejalan dengan temuan BPK, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman terhadap regulasi dan prosedur akuntansi pemerintahan. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun laporan keuangan telah memenuhi kriteria formal WTP, masih dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi agar pelaporan keuangan benar-benar mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik..

Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga berdampak positif pada kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih percaya bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses penganggaran.

Pertanggungjawaban keuangan bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas yang mendalam dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah (Moenek & Suwanda, 2019). Pertanggungjawaban ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran dilakukan dengan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah seperti pelatihan bagi aparatur pemerintahan, penguatan sistem keuangan yang lebih efisien dan transparan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran

sangat penting.



Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM akan membantu meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan, sedangkan penguatan sistem akan mempermudah proses pelaporan dan pemantauan anggaran yang lebih akurat (Halim, 2017). Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan, seperti melalui forum musyawarah atau akses publik terhadap laporan keuangan, akan memperkuat akuntabilitas dan memperkecil potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, tercipta sebuah ekosistem yang mendukung pertanggungjawaban keuangan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap transparansi, integritas, dan kesejahteraan masyarakat.

Gap yang sering terjadi yakni terkait regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah (misalnya Permendagri No. 77 Tahun 2020) telah ditetapkan secara jelas, namun pelaksanaannya di banyak daerah masih belum optimal. Masih terjadi keterlambatan penyusunan laporan keuangan, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem pertanggungjawaban keuangan di Sulawesi Barat, dengan menyediakan wawasan yang mendalam mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam pengelolaan anggaran daerah. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan temuan-temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik keuangan, sehingga tercipta sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini

ujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, in mekanisme pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi yang



lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan, yang tidak hanya mendukung pembangunan daerah secara lebih efektif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Barat.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus, seperti kelemahan dalam sistem pengawasan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, atau kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang efektif (Ardina, 2017). Dengan pemahaman tersebut, pemerintah dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan meningkatkan transparansi. Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan alokasi anggaran untuk program-program prioritas, dan memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Pemahaman yang baik tentang tantangan dalam pertanggungjawaban keuangan akan memfasilitasi pembuatan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan, yang mampu menanggapi perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan politik dengan lebih efektif, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Dalam era desentralisasi, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki sistem pertanggungjawaban keuangan yang kuat dan efektif (Ra'is & Rohman, 2020). Dengan memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi

ungjawaban keuangan, diharapkan dapat tercipta sinergi antara
 aan keuangan dan pembangunan daerah. Kinerja keuangan daerah yang



baik tidak hanya akan berdampak pada kepercayaan masyarakat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik.

Pentingnya penelitian ini juga terletak pada kontribusinya bagi pengembangan teori-teori manajemen keuangan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah, dengan memperkenalkan perspektif baru yang dapat memperkaya literatur yang ada mengenai pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan di tingkat lokal. Melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis data empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam praktik manajemen keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk perbaikan sistem yang ada. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, baik dalam konteks teori maupun praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan pengetahuan akademis, tetapi juga dapat memberikan panduan bagi pengambil kebijakan, praktisi, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.

Penelitian ini didasarkan pada teori pertanggungjawaban (accountability theory) sebagai grand theory, yang menjelaskan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas pengelolaan keuangan daerah. Dalam kerangka teori ini, pemerintah bertindak sebagai steward yang harus menyampaikan laporan keuangan secara transparan, andal, dan tepat waktu kepada masyarakat selaku principal. Teori ini menekankan bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan



pemerintah daerah merupakan bentuk nyata dari akuntabilitas publik, yang menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh

karena itu, segala faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi, sangat penting untuk dianalisis.

Pengaruh kualitas sumber daya manusia pada penelitian ini merujuk pada teori kompetensi (competency theory) yang dikembangkan oleh Boyatzis dan Spencer. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan individu dalam suatu organisasi ditentukan oleh kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang secara langsung mempengaruhi kualitas pelaksanaan tugas, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, untuk menjelaskan peran sistem pengendalian internal pemerintah, digunakan kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), yang menekankan lima elemen penting dalam pengendalian internal: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Sistem pengendalian internal yang kuat berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan atau kecurangan dalam proses keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Penejelasan tentang peran pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi, penelitian ini menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (1992), yang menjelaskan bahwa kualitas sistem dan informasi, serta kepuasan pengguna, menentukan manfaat akhir dari suatu sistem informasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelaporan keuangan, serta memperkuat pengaruh positif dari SDM dan alian internal terhadap nilai laporan keuangan. Dengan menggabungkan i tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara



komprehensif faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai laporan keuangan?
2. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap nilai laporan keuangan?
3. Bagaimanakah pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai laporan keuangan?
4. Bagaimanakah pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap nilai laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai laporan keuangan.
2. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap nilai laporan keuangan.
3. Menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai laporan keuangan.



4. Menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap nilai laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan di sektor publik, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pertanggungjawaban keuangan di tingkat daerah.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika pengelolaan keuangan daerah, termasuk interaksi antara regulasi, kebijakan, dan praktik di lapangan. Ini dapat memperkaya kajian literatur tentang pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
- c. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang kemandirian fiskal daerah, dengan menganalisis pengaruh ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat terhadap pertanggungjawaban keuangan. Ini menawarkan perspektif baru dalam diskusi mengenai otonomi daerah.
- d. Metodologi dan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk studi-studi lanjutan di bidang yang sama, baik di konteks yang serupa maupun berbeda. Ini



mendorong penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan dan akuntabilitas di berbagai daerah.

- e. Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan tentang peran teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan keuangan daerah, serta bagaimana TI dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman bagi Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan praktik pengelolaan keuangan, sehingga anggaran dapat digunakan lebih efisien dan efektif.

- b. Rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik.

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban keuangan, membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan relevan.

- c. Penguatan mekanisme pengawasan internal.

Temuan dari penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki mekanisme pengawasan internal, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

- d. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,



mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan sistem yang lebih canggih.

e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program pelatihan bagi pegawai di pengelolaan keuangan, meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan.

f. Model untuk daerah lain.

Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat dijadikan model bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan keuangan, sehingga memberikan kontribusi lebih luas dalam meningkatkan praktik pertanggungjawaban keuangan di seluruh daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Teori Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban menurut Donaldson & Davis (1991) merupakan bagian dari *agency theory*, dimana teori ini menggambarkan situasi ketika para manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dimana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kekayaan negara, peran akuntansi sangat diperlukan (Triyani & Tubarad, 2018). Menurut Unger (1952), akuntansi merupakan alat untuk pengendalian diri dan sarana pelaporan aktivitas para manajer dalam pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Adapun menurut Goldberg (1965) mengemukakan bahwa manajemen (*agent*) sebagai (*steward*) bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, dalam hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai *steward* dan rakyat sebagai *principal*.

Teori pertanggungjawaban dibangun berdasarkan asumsi filosofi terkait sifat manusia yang pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas serta kejujuran pada pihak lain. Teori ini dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan profit lainnya. Kesuksesan suatu organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *principal* dan manajemen (Wahida, 2015).



Teori pertanggungjawaban membahas terkait dengan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu bentuk penyampaian akuntabilitas pemerintah daerah yaitu melalui pelaporan keuangan yang dilakukan secara rutin dan berkualitas guna menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media dari akuntabilitas publik, yang memiliki kegunaan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Jauhari et al., 2021). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan good governance. Pemerintah daerah perlu mengungkapkan data akuntansi dan informasi lainnya secara jelas, relevan, serta terperinci. Dimana pemerintah daerah dalam hal ini yang bertindak sebagai steward berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang berguna bagi pengguna informasi keuangan pemerintah. Pengguna informasi keuangan dalam hal ini bertindak sebagai principal dan mempunyai hak untuk mengevaluasi akuntabilitas juga membuat keputusan, baik itu keputusan ekonomi, sosial dan politik berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai steward.

Implikasi teori pertanggungjawaban terhadap penelitian ini yaitu menjelaskan terkait keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik, dan mampu mempertanggungjawabkan atas keuangan yang dipercayakan kepadanya sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka

(manajer dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan serta



keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Wahida, 2015).

2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Kualitas laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dalam setiap laporan keuangan yang disusun pemerintah dimana kualitas informasi akuntansi didapatkan apabila penyajian dari laporan keuangan tersebut dapat menunjukkan hasil yang sesuai dengan standar yang berlaku (Mahestri & Fitriani, 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yaitu untuk menyajikan informasi terkait dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang berguna bagi para pengguna dalam hal membuat serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, diantaranya yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan yaitu ketika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan para pengguna dengan membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa yang ada di masa lalu ataupun masa kini, dan memprediksi masa depan, serta



menegaskan ataupun mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Jadi, laporan keuangan yang relevan bisa dikaitkan dengan maksud penggunaannya. Adapun informasi yang relevan mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), berarti informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan ataupun mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), berarti informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa depan berdasarkan hasil masa lalu dan peristiwa saat ini.
- c. Tepat waktu, berarti informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, berarti informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara lengkap, termasuk semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada serta mengungkapkan dengan jelas informasi di balik setiap item informasi utama dalam laporan keuangan untuk mencegah penyalahgunaan informasi.

2. Andal

Suatu laporan keuangan dikatakan andal yaitu ketika informasi di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Adapun informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut.



- a. Penyajian Jujur, berarti informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan ataupun secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (verifiability), berarti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan juga apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, berarti informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- d. Dapat Dibandingkan

Ini berarti informasi yang termuat di dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

3. Dapat Dipahami

Ini memiliki arti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

etiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas n (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian



(WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang, keputusan kontrak yang berdasarkan kualitas laporan keuangan yang rendah akan mempengaruhi transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan (Rosdiani, 2011). Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Emilda, 2014). Laporan keuangan perusahaan akan menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Apabila laporan keuangan perusahaan berkualitas baik maka dapat dikatakan para pelaku usaha berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya dan telah mampu menimbulkan resiko yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.



Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yaitu suatu proses akuntansi yang berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dalam suatu periode akuntansi, laporan keuangan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi mencakup berbagai faktor teknis dan non teknis, kepribadian dan tingkah laku, soft skill dan hard skill, kemudian banyak dipergunakan sebagai aspek yang dinilai banyak perusahaan untuk merekrut karyawan ke dalam organisasi. Menurut Sedarmayanti (2013) *“any personal trait characteristic or skill which can be shown to be directly linked to effective or outstanding job performance”*, yang artinya bakat, sifat dan keahlian individu apapun yang dapat dibuktikan, dapat dihubungkan dengan kinerja efektif dan baik sekali. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya kompeten, berarti cakap, mampu atau terampil. Pada konteks manajemen sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu kepada karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaan.

Menurut Simanjuntak dalam buku Tunggal (2013), Sumber daya manusia definisinya mengandung dua pengertian yaitu, usaha kerja/jasa yang dapat diberikan dalam produksi. Hal ini mencerminkan “kualitas” usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya manusia juga dapat didefinisikan sebagai manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Hal ini mencerminkan “kuantitas” yaitu

manusia yang bekerja pada suatu perusahaan. Dengan manajemen daya manusia yang baik, perusahaan akan memiliki kekuatan kompetitif



dan akan menjadi lebih sulit untuk ditiru sehingga sumber-sumber keberhasilan kompetitif tradisional seperti teknologi proses produksi, protektif pasar, akses terhadap sumber keuangan dan skala ekonomi seharusnya menjadi lebih berdaya guna.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Mangkunegara, 2010). Kompetensi SDM yang sangat penting bagi perusahaan adalah SDM yang memiliki keahlian di bidangnya, menguasai sistem yang ada, motivasi dan berprestasi tinggi, kreatif, inovatif dan berkepribadian dewasa mental dengan kecerdasan emosi baik.

Bidang akuntansi pada perusahaan adalah akuntan yang bekerja untuk internal perusahaan. Posisi sebagai akuntan perusahaan dibagi menjadi beberapa posisi yang lebih spesifik, salah satunya akuntan keuangan. Akuntan keuangan adalah yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak di luar perusahaan (Rudianto, 2012).

Menurut Rudianto (2012) beberapa hal penting yang tercantum dalam profesi akuntan adalah sebagai berikut:



1. Setiap akuntan harus selalu mempertahankan nama baik profesi dan menjunjung tinggi aturan dan etika profesi serta hukum negara dimana ia melaksanakan pekerjaannya.
2. Setiap akuntan harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya.
 - Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretense.
 - Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.
3. Setiap akuntan harus melaksanakan tugasnya sesuai standar teknis dan professional yang relevan.
4. Setiap akuntan harus meningkatkan kecakapan profesionalnya agar mampu memberikan manfaat optimal dalam melaksanakan tugasnya.
5. Setiap akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya.
6. Setiap akuntan harus bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan atau pelaksanaan tugasnya.

2.1.4. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen adalah pengertian dari Sistem Informasi. Istilah sistem informasi dalam arti luas sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi.



— Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para

pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai adalah tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan dapat berguna. Selain yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (garbage).

Sistem informasi menurut Gordon B. Davis (1991) adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Definisi Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi (Nataniel & Hatta, 2009). Sementara itu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (KAUR, 2008).

Terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, adalah syarat minimal yang harus dipenuhi oleh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Keterbukaan ini tidak hanya mencakup akses terhadap data keuangan, anggaran, dan pelaporan

aan dana publik, tetapi juga mencakup informasi mengenai kebijakan, dan kinerja pemerintah yang relevan dengan kepentingan masyarakat.



Dengan adanya sistem informasi yang transparan dan mudah diakses, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, memberikan masukan konstruktif, dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil pemerintah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik. Implementasi keterbukaan informasi publik ini juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengembangan dan pemeliharaan SIPD yang efektif dan efisien merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel..

Good Governance salah satunya adalah menyangkut “transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; wajib melakukan keterbukaan informasi” (Remaja, 2017). Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah dapat dilakukan secara professional seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Selain itu, adanya tuntutan dalam proses perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta keterbukaan informasi publik membuat Pemerintah terpacu untuk berinovasi dalam perencanaan pembangunan. Sehingga terbitlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang

Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini.



Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu nasional sangat penting untuk diwujudkan menuju Good Governance dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat. Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Informasi Pembangunan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. SIPD juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan Pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:

- a. Perencanaan Anggaran Daerah
 - . Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
 - . Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah



- d. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
- e. Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah
- f. Informasi Keuangan Daerah lainnya

Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban.

3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

2.1.5. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong

dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah

n. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60



Tahun 2008 bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh SDM dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu (PP No. 60 Tahun 2008). Sedangkan Mulyadi (2013), menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Pengendalian internal control menurut Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keinginan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal yang ideal di rancang, namun keberhasilannya bergantung pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaannya dan tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Komponen pengendalian Internal menurut COSO :

1. Lingkungan Pengendalian (Control Invironment). Berdasarkan rumusan COSO, bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.



2. **Penilaian Risiko (Risk Assessment).** Menurut COSO, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.
3. **Aktivitas Pengendalian (Control Activities).** Menurut COSO, aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.
4. **Informasi dan Komunikasi (Information and Communication).** COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain dari pengendalian internal.
5. **Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities).** Aktivitas pemantauan menurut COSO merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing – masing dari kelima



komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi.

Berdasarkan konsep COSO, bahwa pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk fokus pada aspek pengendalian internal yang berbeda, yang mencakup tujuan-tujuan operasi, tujuan-tujuan pelaporan, dan tujuan-tujuan ketaatan. Tujuan-tujuan operasi berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan untuk menjaga aset dan kerugian.

Tujuan-tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan baik untuk kalangan internal maupun eksternal yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah, pembuatan-pembuatan standar yang diakui, ataupun kebijakan-kebijakan entitas. Sementara itu, tujuan-tujuan ketaatan berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dengan nama entitas merupakan subjeknya. Tujuan-tujuan pengendalian internal dalam versi COSO tahun 2013 ini pada dasarnya relatif sama dengan yang dikemukakan pada tahun 1992, namun tujuan-tujuan tersebut mengalami perluasan, misalnya pada tujuan-tujuan operasi yang tidak hanya mencakup kinerja keuangan dan pengamanan aset saja, tetapi juga operasi perusahaan atau entitas secara keseluruhan.

2.2. Tinjauan Empiris

Kajian empiris merupakan hasil penelitian, berupa observasi atau percobaan terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan beberapa prinsip yang dijadikan panduan dalam menyelesaikan permasalahan.



Penelitian yang dilakukan oleh Welang (2024) menunjukkan permasalahan/ latar Belakang (GAP): Adanya catatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa yang disebabkan oleh faktor Kualitas Sumber Daya Manusia dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, seberapa besar pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dan seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori berdasarkan teori Jhon Creswell. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket (95 responden), dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan software SPSS 26 yang terdiri dari uji validitas, reliabilitas, normalitas, hipotesis, koefisien korelasi dan determinasi, regresi linear dan uji signifikan. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penulisan ini adalah kualitas sumber daya manusia berpengaruh sebesar 40% terhadap kualitas laporan keuangan, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh sebesar 50% terhadap kualitas laporan keuangan dan kualitas sumber daya manusia dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh sebesar 74 persen terhadap kualitas laporan keuangan. Kesimpulan: kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan kualitas sumber daya manusia dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.



Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilal Hamdi (2023) berjudul *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan*. Pada penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan aplikasi SIPD belum sepenuhnya efektif, dengan masih adanya masalah sistem yang memaksa penyusunan laporan secara manual dan kurangnya pengetahuan dan skill pegawai yang bekerja sebagai akuntan serta regenerasi pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM.

Penelitian Sri Dewi Anggadini, Ari Baramasto dan Sulton Aulia (2021) yang berjudul *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dampak dari Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Pada penelitian ini ditemukan hubungan antara sistem, pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Magfirah Imalia, Indrawan Azis, dan Nur Rachma (2023) dengan judul *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Penelitian Andi Nur Asiah (2019) berjudul *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Kantor SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKPD) di Kabupaten Gowa)*. Hasil penelitian ini menyatakan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi



informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Pelaporan Keuangan.

